

ANALISIS SMART GOVERNANCE DALAM MEWUJUDKAN SMART CITY DI KOTA BANDA ACEH PROVINSI ACEH

Fadhil Rusydi

NPP. 30.0015

Asdaf Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh

Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan

Email: fadhilrusydi5@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Layla Kurniawati, M.Pd

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP) : The low quality of public services, low public information dissemination facilities, and the large number of applications make the implementation of smart governance in Banda Aceh City not optimal. **Purpose** : Thus, this study discusses the implementation of smart cities, especially the dimensions of smart governance in Banda Aceh City. This study aims to analyze the smart governance of the City of Banda Aceh in realizing a smart city and find out how the efforts of the Office of Communication, Informatics and Statistics of the City of Banda Aceh to improve smart governance in realizing a smart city in the City of Banda Aceh. **Method** : A qualitative method with an inductive descriptive approach is used in this study. Determination of informants using purposive sampling and snowball sampling techniques. Data collection was carried out using interviews, observation, documentation, and triangulation techniques. The data analysis technique used is data reduction, data presentation, and drawing conclusions. This study uses the theory of smart governance (Cohen, 2014:2). Cohen examines smart governance from 3 dimensions, namely online services, infrastructure, and open government. **Result** : The results of the study show that smart governance in Banda Aceh City is good. However, there are several obstacles that must be fixed, such as the expansion of online payments in government administration that needs to be expanded again, infrastructure such as the availability of free public wifi, data centers, integration of health and safety services. **Conclusion** : the researchers suggest building super apps, building an ideal data center, and inviting parties outside the government to produce data on the Banda Aceh City Open Data Portal.

Keywords : Smart City, Smart Governance, Public Service

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Kualitas pelayanan publik yang rendah, fasilitas penyebarluasan informasi publik yang rendah, dan banyaknya aplikasi membuat penyelenggaraan smart governance Kota Banda Aceh tidak maksimal. Maka, penelitian ini membahas pelaksanaan smart city khususnya dimensi smart governance di Kota Banda Aceh. **Tujuan :** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis smart governance Kota Banda Aceh dalam mewujudkan smart city dan mengetahui bagaimana upaya dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika Kota Banda Aceh untuk meningkatkan smart governance dalam mewujudkan smart city di Kota Banda Aceh. **Metode :** Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif induktif digunakan pada penelitian ini. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori smart governance (Cohen, 2014:2). Cohen mengkaji smart governance dari 3 dimensi, yaitu online service, infrastruktur, dan open government. **Hasil/Temuan :** Hasil penelitian memperlihatkan bahwa smart governance di Kota Banda Aceh sudah baik. Namun, terdapat beberapa kendala yang harus diperbaiki seperti perluasan pembayaran online dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu diperluas kembali, infrastruktur seperti ketersediaan wifi umum gratis, data center, integrasi pelayanan kesehatan dan keselamatan. **Kesimpulan :** Peneliti menyarankan untuk membangun super apps, membangun data center yang ideal, dan mengajak pihak di luar pemerintahan untuk melakukan produksi data pada Portal Open Data Kota Banda Aceh.

Kata kunci: Kemandirian Keuangan Daerah; Pendapatan Asli Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada pasal 1 ayat 2 pemerintah memiliki fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai sektor. Hal tersebut juga ditegaskan pada pasal 34 ayat (3) dalam Undang- Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dijelaskan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan yang layak. Artinya negara mempunyai kewajiban untuk melayani setiap penduduk tanpa diskriminasi, agar hak dan kebutuhannya terpenuhi, tak terkecuali di era digitalisasi saat ini.

Perubahan di era digitalisasi ini membuat kehidupan manusia juga berubah secara signifikan. Transformasi digital mempengaruhi setiap orang dan di sebagian besar bidang kegiatan (Kozarkiewicz 2020:238). Tak terkecuali pada bidang pelayanan publik yang ikut berdampak dengan memanfaatkan internet untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Masifnya penggunaan teknologi informasi memunculkan konsep smart city yang telah menjadi trend di banyak negara dunia selama beberapa tahun terakhir. Tidak hanya berkaitan dengan gengsi, namun juga upaya percepatan menuju kota yang berbasis teknologi informasi (Giffinger 2007:5).

Pada tahun 2019 Kementerian Komunikasi dan informasi mencanangkan program Gerakan Menuju 100 *Smart City*, salah satu nya adalah Kota Banda Aceh yang didorong untuk melakukan percepatan pembangunan dan penyelesaian masalah perkotaan dengan konsep smart city Berdasarkan *Master Plan smart city* Kota Banda Aceh, Pemerintah Kota Banda Aceh mencanangkan 6 dimensi *smart city*, salah satunya adalah *Smart Governance*, yang menurut *Master Plan Smart City* Kota Banda Aceh merupakan dimensi pembangunan untuk mewujudkan pemerintahan yang dikelola secara

pintar sehingga pemerintah memberikan pelayanan publik yang efisien dan efektif serta berkualitas kepada masyarakat. Pada *Master Plan Smart City* Kota Banda Aceh dimensi *smart governance* dibagi menjadi 3 (tiga) sub pilar. Sub pilar yang pertama dikonsepsikan untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memacu kinerja ASN (Aparatur Sipil Negara) dengan mengintegrasikan 4 tipe *e-government* yaitu, *government to citizen* (G2C), *government to business* (G2B), *government to government* (G2G), dan *government to employee* (G2C). Sub pilar yang kedua adalah Manajemen Birokrasi yang efisien dengan digunakannya sistem E-kinerja untuk meningkatkan kinerja ASN melalui penerapan tunjangan kinerja dan pengoptimalan kinerja pengawasan internal. Sub pilar ketiga adalah efisiensi kebijakan publik dengan melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam musrenbang dan melalui *Government Resource Management System* (GRMS) Pemerintah Kota Banda Aceh.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Implementasi dari penerapan *smart governance* adalah dengan membangun pelayanan publik berbasis digital, total ada 40 aplikasi yang terdapat pada situs <http://smartcity.bandaacehkota.go.id/> untuk mendukung dimensi *smart governance*. 40 aplikasi merupakan jumlah yang banyak jika dibandingkan dengan Kota Medan yang juga menerapkan dimensi *smart governance*, Kota Medan menggunakan total 13 aplikasi yang berkaitan dengan dimensi *smart governance*. Sedangkan Kota Padang yang juga menerapkan dimensi *smart governance* menggunakan 12 aplikasi yang berkaitan dengan *smart governance*. Banyaknya aplikasi ini rentan menimbulkan sebuah masalah baru. Seperti yang diungkapkan oleh Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional bahwa salah satu indikator permasalahan dalam pengelolaan *e-government* di tingkat daerah adalah aplikasi elektronik yang dipakai oleh tiap-tiap perangkat daerah tersebar dan beragam. Padahal, salah satu tujuan diterapkannya konsep *smart city* adalah untuk meningkatkan efisiensi efektifitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; serta memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik sesuai dengan yang tercantum pada pasal 2 ayat 2 Peraturan walikota Banda Aceh Nomor 40 Tahun 2018. Permasalahan lainnya adalah belum memadai fasilitas desiminasi (penyebarluasan) informasi publik terkait dengan *smart governance* Kota Banda Aceh. Menurut Diskominfo Kota Banda Aceh (2017:25) salah satu permasalahan dalam penerapan *smart governance* adalah belum memadai fasilitas desiminasi (penyebarluasan) informasi publik. Terbukti dengan sangat sedikit jumlah yang mengunduh aplikasi Pemerintah Kota Banda Aceh pada google playstore. Permasalahan berikutnya adalah meskipun konsep *smart government* sudah dicanangkan dari tahun 2012, tidak menjamin Banda Aceh berkembang pesat dari segi tata pemerintahan dan pelayanan publik. Berdasarkan indeks kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2021 tingkat pemerintahan kota yang diselenggarakan oleh Ombudsman, Kota Banda Aceh mendapatkan predikat zona kuning dengan angka 72,69 dan berada di peringkat 55 nasional. Peringkat tersebut masih dibawah kota-kota di Provinsi Aceh, seperti Lhokseumawe, Langsa, dan Subulussalam. Tentunya hal tersebut menjadi pukulan bagi Pemerintah Kota Banda Aceh, pasalnya, Banda Aceh merupakan pusat kegiatan pemerintahan aceh, ekonomi, sosial budaya, politik, pelayanan, pendidikan dan kesehatan, perdagangan dan jasa serta keagamaan seharusnya menjadi role model dalam pelaksanaan pelayanan publik. Berdasarkan data dan uraian di atas, penulis tertarik dan ingin mengambil judul “**Analisis Smart Governance dalam Mewujudkan Smart City di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh**”.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu tentang *e-government* dan *smart city* yang menggunakan menggunakan metode penelitian serta berbagai jenis teori yang berbeda.

Penelitian oleh Utama Andri Arjita dengan judul *E-government sebagai bagian dalam Smart City* (Andri Arjita, 2017), menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mengkaji pentingnya penerapan teknologi informasi yang aman dan nyaman sebagai awal terciptanya. Hasil dari penelitian yaitu untuk terciptanya *e-government* diperlukan pondasi awal yaitu dengan membangun teknologi informasi yang aman dan nyaman guna mendukung konsep *smart city*. Penelitian oleh Nurjati Widodo yang berjudul *Pengembangan e-Government di Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Smart City (Studi di Pemerintah Daerah Kota Malang)* (Nurjati-Widodo, 2016) menggunakan metode deskriptif kualitatif sebagai dasar penulisan penelitiannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa seluruh situs layanan SKPD di Kota Malang telah aktif dan memiliki kualitas yang memadai. Penelitian yang dilakukan Enceng dan Anto Hidayat dengan judul *Peningkatan Layanan Publik Melalui Smart Governance dan Smart Mobility* (Enceng, Anto Hidayat, 2015), menggunakan metode kualitatif sebagai dasar dalam penyusunannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa di Kota Bandung tampak dengan jelas pelayanan publik sebelum dan sesudah diterapkannya *smart city* dalam hal kuantitas dan kualitas. Penelitian yang dilakukan oleh Shinta Seftyana, Zahratul Idami, dan Afrijal Silvia dengan judul *Implementasi Smart Governance dalam Mewujudkan Layanan Publik yang Terintegrasi di Kota Banda Aceh* (Seftyana, Idami, Afrijal 2022), menggunakan metode kualitatif dan sumber informasi didapatkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi secara langsung. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pada *smart governance* di Banda Aceh ditemukan integrasi pada website aplikasi data dan layanan masyarakat yang belum *up to date*, serta sistem keamanan data yang tidak jelas. Penelitian oleh Ahmad Fajar Rahmatullah dengan judul *Analisis Penggunaan Konsep Smart Governance dalam Paradigma Smart City di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur* (Andri Arjita, 2017), menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mengkaji penjabaran penggunaan konsep *smart governance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menerapkan *smart governance* berdasarkan 3 komponen penting *smart governance* dari Boyd Cohen.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana penelitian ini tidak dilakukan dengan pendekatan campuran (kualitatif dan kuantitatif). Penelitian ini menggunakan teori *smart governance* menurut Cohen (2014) dengan menggunakan 3 dimensi yaitu, *online service*, *infrastructure*, dan *open government*.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *smart governance* pada salah satu dimensi *smart city* Kota Banda Aceh serta bagaimana upaya dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika Kota Banda Aceh untuk meningkatkan dimensi *smart governance*.

II. METODE

Penelitian ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam pendekatan kualitatif ini Sugiyono menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. (Sugiyono, 2014).

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi. Dalam melakukan pengumpulan data primer, penulis melakukan wawancara secara semi terstruktur terhadap 13 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika Kota Banda Aceh, Kepala Bidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan *Smart City*, Kepala Bidang *E-Government*, Pengelola Sistem dan Jaringan, Tenaga Ahli Programmer, Pegawai Negeri Sipil, dan 7

masyarakat. Adapun analisisnya menggunakan teknik yang terdiri dari 3 komponen analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini akan menjelaskan mengenai analisis terhadap dimensi *smart governance* untuk mengetahui sejauh mana penerapan *smart city* di Kota Banda Aceh dengan menggunakan teori Cohen tentang *smart governance*. Teori tersebut terdiri dari 3 dimensi, yaitu *online service*, *infrastructure*, dan *open government*. Adapun pembahasan dapat dilihat melalui subbab berikut.

3.1. Analisis Smart Governance dalam Mewujudkan Smart City di Kota Banda Aceh

3.1.1. Online Service

3.1.1.1. Online Procedures

Indikator *online procedures* dimaksudkan untuk mengetahui prosedur online pelayanan administrasi pemerintahan dan administrasi publik. Prosedur online pada *smart governance* Kota Banda Aceh menjadi vital karena peningkatan pelayanan publik online merupakan salah satu misi dari Diskominfotik sebagai pengelola *smart governance*. Saat ini Pemerintah Kota Banda Aceh sudah memiliki layanan administrasi pemerintahan dan layanan administrasi publik. Salah satunya adalah hadirnya aplikasi e-surat.

Hadirnya e-surat menunjukkan bahwa jumlah surat yang diselesaikan oleh Diskominfo Banda Aceh melalui aplikasi e-surat terus meningkat dari awal tahun peluncuran aplikasi, yaitu 2020 hingga tahun 2022. Hasil penelitian juga ditemukan bahwa seharusnya ada beberapa aplikasi yang bisa diintegrasikan atau dihapus karena dianggap tidak efektif. Seperti aplikasi SUWARGA yang berfungsi sebagai kanal pengaduan, padahal pemerintah pusat sudah menyediakan aplikasi kanal pengaduan SP4N LAPOR. Kemudian, aplikasi e-retribusi DLKH3 Banda Aceh seharusnya bisa diintegrasikan ke aplikasi Siperi (Sistem Informasi Pencatatan Retribusi).

3.1.1.2. Electronical Benefit Payment

Pemerintah Kota Banda Aceh telah menerapkan pembayaran digital dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan yang berkaitan langsung dengan publik. Salah satu contohnya adalah penerapan Parkir Elektronik non tunai, yang sampai saat penelitian ini ditulis, terdapat di 3 ruas jalan, yaitu Jalan Prof. Ali Hasyimi, Jalan Ratu Syafiatuddin, dan Jalan TP Nyak Makam.

Namun, jumlah parkir elektronik non tunai sangat sedikit jika dibandingkan dengan banyaknya ruas jalan di Kota Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh telah berencana untuk menambah jumlah parkir elektronik non tunai secara bertahap untuk mencegah kebocoran PAD dan praktik juru parkir liar. Hasil penelitian juga menunjukkan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2022 dari retribusi parkir tepi jalan umum berjumlah Rp 5.124.796.983. Hanya mencapai 50,25 % dari target PAD yang telah ditetapkan (Dishub:2023).

Kemudian Pemerintah Kota Banda Aceh juga menerapkan pembayaran elektronik dalam hal zakat. Layanan penyaluran zakat dapat disalurkan secara elektronik melalui QRIS, sebuah QR code untuk pembayaran elektronik.

3.1.2. Infrastructure

3.1.2.1 Wifi Covarage

Pada saat ini Pemerintah Kota Banda Aceh telah menyiapkan sarana wifi gratis di 2 titik di Kota Banda Aceh yaitu Pasar Al Mahirah dan tempat wisata PLTD Kapal Apung. Namun, hal tersebut sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah public space di Banda Aceh yang berjumlah 97 *public*

space (DLHK3 Banda Aceh:2017). Fasilitas wifi gratis perlu menjangkau seluruh lapisan masyarakat Kota Banda Aceh.

3.1.2.2. Broadband Covarage

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa masih banyak kekurangan infrastruktur broadband. Diantaranya adalah tidak terintegrasinya server dan pengelolaannya yang mandiri karena keterbatasan dan tidak idealnya infrastruktur. Kemudian pengelolaan jaringan internet yang tidak seragam padahal sudah ada kebijakan satu internet.

3.1.2.3. Sensor Covarage

Di beberapa OPD Kota Banda Aceh telah menerapkan sensor wajah pada sistem absensi dan presensi yang terintegrasi dengan jaringan intra lokal memanfaatkan *Wide Area Network* (WAN) Kota Banda Aceh.

Kemudian Pemerintah Kota Banda Aceh juga memiliki sistem vehicle detector yang terdapat pada 6 persimpangan. Sistem ini bisa mendeskripsikan jumlah kendaraan, jenis kendaraan dan kecepatan kendaraan yang berlalu lalang secara otomatis. *Vehicle detector* adalah ke dalam sistem *Area Traffic Control System* (ATCS) yaitu sistem pengendalian lalu lintas yang berbasis elektronik. ATCS memiliki beberapa sistem yaitu, server workstation yang memiliki fungsi sebagai pusat operasional, kemudian local controller yang memiliki fungsi pengontrol persimpangan, *wall map* yang menyediakan informasi status dan kondisi dari *local controller*, kemudian CCTV dan *vehicle detector*.

3.1.2.4. Integrated Health and Safety Operations

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kota Banda Aceh telah mengintegrasikan beberapa aplikasi. Namun, dari 4 aplikasi yang diintegrasikan, semuanya aplikasi non pelayanan kesehatan dan keselamatan. Padahal Kota Banda Aceh memiliki beberapa aplikasi di layanan kesehatan dan keselamatan seperti SpinaKes, e-Puskesmas, Antrian Rumah Sakit Meuraxa melalui WA dan E-Posyandu. Harapannya Pemerintah Kota Banda Aceh dapat memperhatikan integrasi layanan kesehatan dan keselamatan sebagaimana teori cohen bahwa layanan kesehatan dan keselamatan harus terintegrasi padu dalam satu layanan.

3.1.3 Open Government

3.1.3.1 Open Data

Open Data di Pemerintah Kota Banda Aceh dimulai dari tahun 2014 dan kemudian didukung dengan terbitnya Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 26 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data. Pada tahun 2017 seluruh OPD di lingkup Pemerintah Kota Banda Aceh sudah terintegrasi dengan portal open data. Semua informasi dapat diakses oleh publik melalui laman <https://data.bandaacehkota.go.id/>.

3.1.3.2 Open Apps

Pada indikator *Open Apps* sendiri, Pemerintah Banda Aceh memiliki beberapa aplikasi yang dapat diakses melalui smartphone. Seperti Mi Abang dan Suwarga, namun yang menjadi masalah adalah tidak banyak yang mendownload aplikasi tersebut. Pemerintah Kota Banda Aceh menyadari bahwa perlu adanya penyederhanaan dan integrasi aplikasi sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi aplikasi. Oleh karena itu, berdasarkan hasil observasi peneliti, Pemerintah Kota Banda Aceh membangun satu aplikasi integrasi yaitu Info Banda Aceh, yang berisi segala macam informasi seperti kuliner, berita, aspirasi dan laporan, dokter, olahraga dan lain-lain.

3.1.3.3 Privacy

Berdasarkan hasil penelitian, Kota Banda Aceh belum pernah serangan yang bersifat destruktif dan pencurian data. Serangan siber terakhir kali terjadi pada *website* gampong yang diberikan oleh Diskominfo Kota Banda Aceh dan dikelola oleh gampong itu sendiri. Namun, pihak gampong tidak mengupdate website tersebut sehingga terjadi serangan. Hal tersebut terjadi karena website yang sudah lama tidak terpakai.

Berdasarkan informasi diatas, maka untuk mengantisipasi serangan siber perlu adanya peningkatan kompetensi bagi pelaksana *smart governance* di Kota Banda Aceh karena serangan terjadi akibat dari *human error*.

3.2. Upaya Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika Kota Banda Aceh untuk Meningkatkan Smart Governance dalam Mewujudkan Smart City di Kota Banda Aceh

3.2.1. Upaya Meningkatkan Online Service

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sudah ada beberapa upaya dari Diskominfo Banda Aceh untuk meningkatkan *Online Service* di Kota Banda Aceh dan hal tersebut sesuai dengan Renstra dan *Master Plan Smart City* Kota Banda Aceh yang menjadi pedoman arah kebijakan. Khusus untuk persentase website, telah mengalami peningkatan persentase dari tahun ke tahun.

Selanjutnya Diskominfo bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh juga akan melakukan penambahan area parkir elektronik non tunai untuk menghindari kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3.2.2. Upaya Meningkatkan Infrastructure

Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Diskominfo telah membangun fasilitas infrastruktur yaitu *command center*, yang menjadi pusat kontrol data, aplikasi hingga server. Diskominfo juga membuat program perluasan jaringan intra net pada setiap OPD. Pada tahun 2023, seluruh OPD di lingkup Pemerintah Kota Banda sudah terlayani oleh jaringan intrakoneksi radio dan fiber optic. Kedua jaringan ini mempunyai fungsi vital dalam mengirim sinyal dan data dari satu tempat ke tempat lainnya. Pemerintah Kota Banda Aceh juga berencana untuk mengadakan kamera analitis/sensor di beberapa titik di Kota Banda Aceh

3.2.3. Upaya Meningkatkan Open Government

Upaya Diskominfo Kota Banda dalam meningkatkan kualitas open government melalui portal open data Kota Banda Aceh melalui beberapa program, yaitu integrasi portal open data Banda Aceh dengan portal data nasional, membangun ekosistem digital serta penguatan jaringan. Diskominfo juga melakukan upaya lainnya dalam meningkatkan open government, salah satunya dalam meningkatkan open apps dan privacy, yaitu dengan integrasi aplikasi yang sudah mulai dilakukan dan bimbingan teknis keamanan data kepada pengelola sistem dan jaringan yang bertujuan mencegah serangan siber pada sistem elektronik Kota Banda Aceh.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penulis menemukan temuan penting yakni dari hasil penelitian terhadap analisis kategori kinerja yaitu sub kategori smart governance sebagai bagian dari konsep smart city yang dijabarkan oleh para ahli seperti Giffinger. Peneliti melihat bahwa dari ketiga dimensi dari Cohen, dapat dilihat pada dimensi online service, Pemerintah Kota Banda Aceh sudah menjalankan prosedur online pelayanan administrasi pemerintahan dan administrasi publik serta pembayaran online. Namun, khusus untuk pembayaran online, perlu diperluas lagi sehingga tidak terbatas di beberapa area dan kawasan. Pada dimensi infrastructure, terdapat kekurangan pada jumlah wifi gratis, data center, dan

integrasi pelayanan kesehatan dan keselamatan. Kemudian pada open government, Pemerintah Kota Banda Aceh menunjukkan komitmennya melalui Portal Open Data Banda Aceh dan aplikasi Info Banda Aceh.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa berdasarkan analisis terhadap *smart governance*, Pemerintah Kota Banda Aceh sudah menjalankan prosedur online pelayanan administrasi pemerintahan dan administrasi publik serta pembayaran online. Namun, khusus untuk pembayaran online, perlu diperluas lagi sehingga tidak terbatas di beberapa area dan kawasan. Pada dimensi infrastructure, terdapat kekurangan pada jumlah wifi gratis, data center, dan integrasi pelayanan kesehatan dan keselamatan. Kemudian pada open government, Pemerintah Kota Banda Aceh menunjukkan komitmennya melalui Portal Open Data Banda Aceh dan aplikasi Info Banda Aceh..

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika sebagai model studi kasus.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan *smart city* pada tahun selanjutnya untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Andri Arjita, Utama. 2017. *E-Government* sebagai Bagian dalam *Smart City*.
Cohen. 2014. *Blockchain Cities and the Smart City Wheel*.
Diskominfo Kota Banda Aceh. 2017. *Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh Tahun 2017- 2022*.
Enceng, Hidayat Anto. 2015. *Peningkatan Layanan Publik Melalui Smart Governance dan Smart Mobility*.
Kozarkiewicz. 2020. *Bone Union Quality after Fracture Fixation of Mandibular Head with Compression Magnesium Screws*.
Pemerintah Kota Banda Aceh. 2019. *Master Plan Smart City-Kota Banda Aceh. 1*.
Pemerintah Kota Banda Aceh. 2019. *Master Plan Smart City-Kota Banda Aceh. 2*.
Pemerintah Kota Banda Aceh. 2019. *Master Plan Smart City-Kota Banda Aceh. 3*.
Perwali Kota Banda Aceh Nomor 40 Tahun 2018 Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
Perwali Kota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Smart City
Rahmatullah, Amad Fajar. 2021. *Analisis Penggunaan Konsep Smart Governance dalam Paradigma Smart City di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur*.
Shinta Seftyana, Zahratul Idami, Afrijal. 2022. *Implementasi Smart Governance dalam Mewujudkan Layanan Publik yang Terintegrasi di Kota Banda Aceh*.
Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Widodo. Nurjati 2018. *Pengembangan E-government di Pemerintahan Daerah dalam Rangka Mewujudkan Smart City.*